

Implementasi Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Aset atau Barang Milik Daerah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang

Aisah¹ Mohamad Djasuli²

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura,
Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, Indonesia^{1,2}

Email: aisahary19@gmail.com¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Penggunaan Teknologi informasi dalam pengelolaan barang milik daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Sampang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mendeskripsikan aspek-aspek yang berkaitan dengan objek penelitian secara mendalam. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Dalam mengumpulkan data-data, penulis membuat daftar pertanyaan untuk ditanyakan langsung kepada informan yang berhubungan langsung dengan pengelolaan asset/barang milik daerah dengan melakukan wawancara ataupun observasi langsung ke tempat penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan teknologi informasi berpengaruh besar terhadap kompetensi kinerja pegawai dan berkontribusi pada peningkatan transparansi dalam pengelolaan aset. Transparansi ini tercapai melalui mudahnya akses terhadap data aset yang relevan bagi pemangku kepentingan, termasuk auditor, regulator, dan masyarakat umum.

Kata Kunci: Teknologi Informasi, Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengelolaan Aset



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang semakin pesat telah membawa perubahan di segala sektor kehidupan manusia. Untuk itu penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi merupakan keharusan bagi masyarakat Indonesia dalam mewujudkan manusia yang berkualitas. Teknologi Informasi dapat dilihat sebagai suatu inovasi yang dapat mempermudah kinerja manusia. Dimana inovasi dapat diartikan sebagai membuat suatu kebaruan yang dapat membuat sesuatu yang di kerjakan menjadi efektif dan efisien. Kebutuhan akan informasi yang cepat, andal, dan akurat dalam kondisi lingkungan yang penuh dengan ketidak pastian mutlak diperlukan. Teknologi informasi khususnya teknologi komputer sangat berpotensi untuk memperbaiki performa individu dan organisasi. Penerapan teknologi informasi pada setiap organisasi berkaitan dengan strategi dan tujuan masing-masing organisasi. Penerapan teknologi informasi harus sejalan dengan tujuan organisasi yang dapat dicapai dengan adanya pengolahan teknologi informasi yang baik (Gunawan, 2024). Di era globalisasi seperti sekarang ini, seluruh organisasi telah menggunakan komputer dalam kegiatan atau aktivitasnya dalam menunjang penyelesaian pekerjaan. Komputer tersebut merupakan penggunaan teknologi yang diterapkan perusahaan untuk memudahkan pegawai dalam mengerjakan tugasnya. Di dalam komputer tersebut terdapat perangkat lunak yaitu aplikasi, dimana aplikasi tersebutlah yang mendukung pekerjaan karyawan/pegawai. Penggunaan teknologi dalam organisasi telah sepenuhnya merestrukturisasi organisasi dengan membuat proses penyelesaian pekerjaan menjadi sangat efektif dan efisien dari sebelumnya. Transformasi teknologi juga berubah dengan cepat, sehingga apabila pegawai atau karyawan bekerja dengan alat dan metode lama, mereka tidak

akan seefektif yang seharusnya (Deal, 2007). Oleh karena itu, implementasi solusi dan teknologi dilakukan sebagai upaya meningkatkan kinerja maupun nilai daya saing dari organisasi. Tanpa kesuksesan implementasi, maka penggunaan sistem informasi yang aman dari hasil adopsi teknologi, manfaat yang diantisipasi dan keunggulan kompetitif dari sistem tidak akan tercapai. Mengingat kemajuan teknologi dan masalah perilaku organisasi dari penggunaan sistem, maka sangat penting untuk memahami apa yang menyebabkan pengguna menerima atau menolak sistem informasi baru dan langkah-langkah keamanan terkait (Mugiarto et al., 2023).

Penggunaan teknologi yang tepat dan kuat dapat membawa banyak manfaat, seperti keamanan, kecepatan, dan kinerja. Teknologi juga berpotensi meringankan beban staf yang ada. Apabila teknologi digunakan dengan tepat, maka hal ini dapat mengurangi biaya secara signifikan. Pendekatan semacam itu juga didukung oleh para peneliti, yang menyatakan bahwa sistem komputer dalam sebuah organisasi menawarkan manfaat ekonomi, karena membantu mengidentifikasi potensi hambatan dalam penyediaan dukungan teknologi dan penyelesaian pekerjaan. Secara alami, perlu ada kemauan di antara staf untuk menggunakan informasi ini dan mengintegrasikan menjadi program perbaikan berkelanjutan. Pentingnya pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas pelaporan barang milik negara (BMN) pada organisasi pemerintah. Hasil kajian yang dilakukan oleh Imran et al., (2014) mengungkapkan bahwa penggunaan teknologi baru akan meningkatkan kinerja karyawan ketika mereka menggunakan teknologi untuk kepentingan organisasi dengan nilai etika. Lebih lanjut, Imran et al., (2014) juga menjelaskan bahwa kemajuan teknologi membantu mengurangi beban kerja karyawan dan tenaga manusia. Terlepas dari kontradiksi secara empiris, penggunaan teknologi dalam proses pelaporan aset barang milik negara telah meningkat dan banyak diantaranya memfokuskan pada ketersediaan aplikasi pendukung.

Pemanfaatan teknologi informasi yang dimaksud adalah penggunaan aplikasi komputer akuntansi pada pengelolaan keuangan daerah. Penerapan sistem komputerisasi akuntansi pada pemerintah daerah akan mempercepat proses pencatatan, penyajian, analisa dan laporan keuangan pemerintah daerah karena aplikasi komputer akuntansi diciptakan untuk mengotorisasi transaksi-transaksi akuntansi ke dalam sebuah laporan dan analisa laporan untuk mendukung pengambilan keputusan sehubungan dengan keadaan keuangan dalam suatu periode akuntansi. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah pusat dan daerah diatur dalam PP No. 56 tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah yang merupakan peraturan pengganti dari PP No.11 tahun 2001 tentang sistem informasi keuangan daerah. Teknologi merupakan salah satu komponen yang mempengaruhi organisasi sektor publik yang kompleks. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi dalam hal ini aplikasi komputer akuntansi pada lingkup pemerintah pusat dan daerah sangat penting dalam membantu pejabat pengelola keuangan SKPD maupun PPKD dalam menyusun laporan keuangan yang berbasis akrual dengan efektif, efisien, dan ekonomis berdasarkan standar akuntansi pemerintahan (Nadir & Hasyim, 2017).

Tinjauan Pustaka

Aset

Pengertian aset secara umum adalah barang (thing) atau sesuatu barang (anything) yang mempunyai nilai ekonomi (economic value), nilai komersial (commercial value) atau nilai tukar (exchange value) yang dimiliki oleh instansi, organisasi, badan usaha ataupun individu (perorangan). Aset adalah barang, yang dalam pengertian hukum disebut benda, yang terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak, baik yang berwujud (tangible) maupun yang tidak berwujud (Intangible), yang tercakup dalam aktiva atau kekayaan atau

harta kekayaan dari suatu instansi, organisasi, badan usaha atau individu perorangan yang dari Lembaga Administrasi Negara (2007) (Nugraha et al., 2023). Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) "aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh masyarakat maupun pemerintah, serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya". Aset berdasarkan Martin ialah aset berwujud yang dimiliki agar digunakan pada produksi atau penyediaan barang atau jasa, guna disewakan bagi pihak lain, atau sebagai tujuan administratif serta diperlukan agar digunakan selama lebih dari satu periode. Dalam penelitian Bestari & Tarigan, (2022) menjelaskan bahwa pengertian aset yang sudah di definisikan secara global adalah barang atau sesuatu barang yang mempunyai: Nilai ekonomi (Economic Value); Nilai Komersial (Commercial Value) atau Nilai Tukar (Exchange Value) yang dimiliki pada instansi, organisasi, badan usaha ataupun individu.

Barang Milik Daerah

Menurut Peraturan Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang dimaksud barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah meliputi: Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis; Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan 6 undang-undang atau barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya, barang milik daerah dibedakan menjadi dua jenis, yaitu barang inventaris dan barang pakai habis (Priyono, 2018). Dalam penelitian Wonggow et al., (2014) menjelaskan mengenai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Pasal 3 Ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa:

1. Barang Milik Daerah meliputi:
 - a. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD.
 - b. Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Barang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis.
 - b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian.
 - c. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang.
 - d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengelolaan aset merupakan dasar Pemerintah Daerah untuk mengelola asetnya, hal ini memiliki dampak pada bertambahnya fungsi dari aset itu sendiri, baik dalam hal jumlah ataupun nilai aset tersebut. Dari mulai diberlakukannya regulasi mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan beragam bentuk regulasi yang diterapkan lainnya diupayakan bisa dijadikan dasar dan kekuasaan pemerintah untuk mengelola aset daerahnya (Mokodompit, Morasa dan Warongan, 2017). Tujuannya adalah agar pelaporan yang dibuat dapat dipertanggungjawabkan dengan baik terutama seluruh masyarakat serta sesuai tujuan (Kusuma Dewi & Nugraheni, 2020). Pengelolaan Barang Milik Daerah terdapat sistem dan prosedur yang harus dilaksanakan agar Pengelolaan Barang Milik Daerah dapat dikelola dengan baik. Sistem adalah kumpulan elemen yang saling berkaitan dan bekerja sama dalam melakukan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan (Sujarweni, 2015:1). Sondakh et al., (2017)

menjelaskan bahwa Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 pasal didalamnya terdapat sistem dan prosedur, sebagai teknis dalam pengelolaan Barang Milik daerah. Berikut beberapa uraian dari sistem dan prosedur menurut Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014:

1. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran
2. Pengadaan
3. Penggunaan
4. Pemanfaatan
5. Pengamanan dan Pemeliharaan
6. Penilaian
7. Pemindahtanganan
8. Pemusnahan
9. Penghapusan
10. Penatausahaan
11. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

Teknologi Informasi

Teknologi Informasi menurut Bambang Warsita dalam penelitian (Pribadi et al., 2023) merupakan sarana dan prasarana (hardware, software, useware) sistem dan metode untuk memperoleh, mengirim, mengolah, menyimpan, mengorganisasikan, dan menggunakan data secara bermakna. Hal yang sama juga di ungkapkan oleh Mulyadi (2014: 21) bahwa Teknologi Informasi adalah mencakup komputer (baik perangkat keras dan perangkat lunak), berbagai peralatan kantor elektronik, perlengkapan pabrik dan telekomunikasi. Menurut Sutarman (2009:14) indikator Teknologi Informasi adalah sebagai berikut:

1. Perangkat Keras
2. Perangkat Lunak
3. Basis Data
4. Jaringan Komputer
5. Pengguna

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Deskriptif adalah metode yang bertujuan untuk mencatat, mengolah, menyajikan dan menginterpolasi data untuk memberikan gambaran yang nyata dan jelas (Wandy Zulkarnaen & Yayan Sofyan, 2018). Penelitian kualitatif deskriptif ini digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi teknologi informasi dalam pengelolaan aset atau barang milik daerah di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Sampang. Sumber data yang diambil dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang diperoleh dari penelitian terdahulu dan data primer dengan melakukan wawancara langsung kepada pegawai atau staff.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Teknologi informasi memiliki potensi besar dalam menyederhanakan dan mempercepat proses pelaporan aset. Sistem TI yang canggih mampu menyediakan platform yang memungkinkan pengumpulan data yang akurat, pengolahan yang cepat, serta penyajian informasi yang mudah diakses dan dipahami. Ini termasuk penggunaan software manajemen aset, basis data terintegrasi, dan aplikasi pelaporan online. Penerapan sistem teknologi informasi berkontribusi pada peningkatan transparansi dalam pelaporan aset. Transparansi ini tercapai melalui kemudahan akses terhadap data aset yang relevan bagi pemangku

kepentingan, termasuk auditor, regulator, dan masyarakat umum dengan transparansi yang lebih baik, pemerintah daerah dapat meningkatkan kepercayaan publik serta memfasilitasi pengawasan yang lebih efektif terhadap pengelolaan aset.

Adanya sistem digital dalam pengelolaan aset membuat waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan, mengolah, dan melaporkan data aset berkurang secara drastis. Hal ini dikarenakan sistem teknologi informasi meminimalisir penggunaan dokumen fisik dan proses manual yang sering kali memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan. Selain itu, sistem ini juga memungkinkan integrasi data dari berbagai sumber, sehingga memudahkan dalam penggabungan dan analisis data aset secara keseluruhan. Teknologi informasi digunakan untuk menyusun, menyimpan, memanipulasi data dengan berbagai cara agar menghasilkan informasi yang berkualitas, hasil informasi tersebut relevan, akurat, dan tepat waktu bagi organisasi pribadi, bisnis dan pemerintahan yang merupakan informasi strategis. Sistem teknologi informasi juga dapat mengurangi risiko kesalahan manusia yang sering terjadi dalam pengelolaan data secara manual. Dengan adanya basis data terpusat dan proses yang terautomasi, informasi aset dapat diperbarui secara real-time dan dengan tingkat keakuratan yang lebih tinggi. Hal ini sangat penting untuk menghindari penyajian data yang salah atau menyesatkan, yang bisa berdampak negatif pada pengambilan keputusan di tingkat pemerintahan daerah. Keandalan data ini juga memperkuat aspek akuntabilitas dalam pengelolaan aset pemerintah.

Teknologi informasi membantu dalam menjaga keakuratan data dan menghindari kerugian yang disebabkan oleh kesalahan. Dengan sistem informasi terpusat, pegawai memiliki akses cepat dan mudah untuk informasi yang relevan mengenai aset atau barang milik daerah, sehingga memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan yang lebih cepat dan lebih tepat berdasarkan data yang akurat. Penggunaan teknologi informasi, pegawai dapat dengan cepat merespons perubahan atau kebutuhan mendesak dalam pengelolaan aset. Sistem yang terhubung secara real-time memungkinkan pegawai untuk segera mengidentifikasi masalah dan mengambil tindakan korektif tanpa menunggu proses manual yang lambat. Jika kantor BPPKAD memberikan layanan kepada masyarakat terkait pengelolaan aset atau barang milik daerah, maka penggunaan teknologi informasi dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan tersebut. Pegawai dapat memberikan informasi yang lebih akurat dan cepat kepada masyarakat melalui sistem yang terkomputerisasi.

Sistem informasi dapat digunakan untuk memantau kinerja pegawai dalam mengelola aset atau barang milik daerah. Data yang tercatat dalam sistem dapat digunakan untuk mengevaluasi produktivitas, akurasi, dan efektivitas kerja pegawai. Dengan adanya sistem informasi yang terdokumentasi dengan baik, tindakan dan keputusan yang diambil oleh pegawai dapat dilacak dan dipertanggungjawabkan. Hal ini mendorong pegawai untuk bertindak secara bertanggung jawab dalam pengelolaan aset daerah. Data yang dikumpulkan melalui sistem informasi dapat digunakan untuk analisis yang lebih mendalam tentang kinerja dan efisiensi operasional. Informasi yang dihasilkan dari analisis ini dapat membantu pegawai dalam mengidentifikasi area-area untuk perbaikan dan pengoptimalan proses. Teknologi informasi yang memudahkan tugas-tugas administratif dan meningkatkan efisiensi, pegawai cenderung merasa lebih puas dengan pekerjaan mereka. Kepuasan pegawai yang meningkat dapat berdampak positif pada kinerja keseluruhan dan retensi karyawan.

Penggunaan teknologi informasi juga dapat meningkatkan kinerja secara optimal, tetapi dengan catatan bahwa dampaknya harus meningkatkan kompetensi dari pegawai pengelola BMD terlebih dahulu. Alasan tingginya penerimaan teknologi dalam suatu organisasi adalah karena teknologi adalah salah satu elemen paling signifikan yang terkait dengan manajemen operasi yang efektif dalam suatu organisasi. Selain itu, transparansi dan efisiensi ditemukan

meningkat ketika ada penggunaan teknologi dalam organisasi. Sebagaimana dinyatakan sebelumnya, bahwa teknologi telah menjadi sangat penting untuk setiap pekerjaan di lingkungan kerja, terutama membantu mengurangi kesalahan manusia, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan kecepatan komunikasi.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan sistem teknologi informasi dalam pengelolaan aset pemerintah daerah tidak hanya meningkatkan kualitas pelaporan, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan aset. Hal ini sangat penting mengingat aset pemerintah daerah merupakan komponen vital dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan aset pemerintah daerah, termasuk melalui pelatihan sumber daya manusia dan peningkatan infrastruktur teknologi informasi, untuk memastikan bahwa manfaat sistem ini dapat dirasakan secara maksimal oleh pemerintah daerah dan masyarakat secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Bestari, K. P., & Tarigan, A. A. (2022). Analisis Sistem Penghapusan Aset / Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 3(6), 1234–1243.
- Gunawan, H. (2024). Analisis Penerapan Sistem Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Pelaporan Aset Pada Pemerintahan Daerah. 6(1), 110–119.
- Kusuma Dewi, A. R., & Nugraheni, A. P. (2020). Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah Di Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Tahun 2018/2019. *Jurnal Ilmiah MEA*, 4(3), 761–776.
- Mugiarto, M., Agustina, I., & Suryaman, W. (2023). Adoption Of Asset Application Technology And Employee Competence In Improving Employee Performance Of State-Owned Asset Management In Sopd Cimahi City. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4(5), 4823–4835. <http://journal.yrpiiku.com/index.php/msej>
- Nadir, R., & Hasyim, H. (2017). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua (Studi Empiris Di Pemda Kabupaten Barru). *Akuntabel*, 14(1), 57.
- Nugrahaa, F., Surarsob, B., & Noranitac, B. (2023). Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Marketplace dengan Metode Simple Additive Weighting (SAW). *EVOLUSI: Jurnal Sains Dan Manajemen*, 11(1), 67–72. <https://doi.org/10.31294/evolusi.v11i1.15410>
- Pribadi, A. R., Karnadi, & Sari, L. P. (2023). Pengaruh Pengetahuan Akuntansi Dan Teknologi Informasi Terhadap Pengelolaan Barang Milik Daerah Dengan Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso). *Pengaruh Brand Equity Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Thrift Shopping Pada Mahasiswa Universitas Abdurachman Saleh Situbondo*, 2(1), 74–87.
- Priyono, K. (2018). Keandalan Informasi Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akrua: Kajian Pengelolaan Aset Tetap Daerah Kabupaten Sampang. *Analytical Biochemistry*, 11(1), 1–5.
- Sondakh, B. Y., Sabijono, H., & Mawikere, L. (2017). Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan). *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2), 1171–1181.
- Wandy Zulkarnaen, & Yayan Sofyan. (2018). Pengaruh Kepuasan Kerja dan Komitmen Organisasi Terhadap Keinginan Bepindah Karyawan PT. Delami Garmen Kota Bandung. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 5(1), 105.

Wonggow, A., Ilat, V., & Affandi, D. (2014). Kajian Mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah Di Pemerintah Kota Manado Menurut Permendagri No. 17 Tahun 2007. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(1), 582–593.